

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia merupakan negara berkembang yang memiliki berbagai macam potensi wisata, potensi wisata tersebut adalah wisata alam dan wisata kebudayaan. Indonesia memiliki wilayah yang sangat luas dengan didukung oleh sumber daya alam yang beraneka ragam, selain itu juga berpotensi untuk diolah dan dimanfaatkan. Selain itu negara Indonesia memiliki kekayaan seni budaya daerahnya, mulai dari adat istiadat dan peninggalan sejarah terdahulu serta yang tidak kalah menarik adalah keindahan panorama alamnya yang cukup potensial untuk dikembangkan dengan baik. Kehidupan warga negara Indonesia masih kental dengan kebudayaan, karena Indonesia merupakan negara yang memiliki keberagaman budaya, dan juga terkenal dengan panorama alamnya dan pariwisata. Ternyata sektor pariwisata juga dapat diandalkan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pembangunan nasional.

Pariwisata merupakan berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, Pemerintah dan Pemerintah Daerah¹. Pengembangan suatu tempat yang dijadikan daerah pariwisata diharapkan menjadi sumber dan potensi kegiatan ekonomi yang dapat diandalkan yang mampu mengembangkan kegiatan ekonomi, termasuk kegiatan sektor lain sehingga lapangan pekerjaan, pendapatan masyarakat,

¹ Undang-undang Republik Indonesia No 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisata.

Pendapatan daerah dan pendapatan Negara, serta, penerimaan devisa meningkat melalui upaya pengembangann dan pembangunan berbagai potensi kepariwisataan dengan tetap memelihara kepribadian bangsa dan kelestarian fungsi serta mutu lingkungan hidup.

Selanjutnya untuk meningkatkan pembangunan pariwisata yang dilakukan, maka pemerintah dituntut menjalin kerja sama baik dengan sektor swasta ataupun masyarakat sehingga pengembangan pariwisata dapat dilakukan secara maksimal. Peran pemerintah sebagai fasilitator disini dapat diartikan sebagai pembuat iklim yang nyaman bagi pelaku kegiatan pariwisata dapat berkembang secara efektif dan efisien. Sektor pariwisata pun diharapkan dapat menggerakkan ekonomi rakyat, karena dianggap sebagai sektor yang paling siap dari kesediaan fasilitas, sarnaa dan prasarana jika dibandingkan dengan sektor lainnya.

Pertumbuhan kunjungan wisatawan di dunia saat ini selalu meningkat dari tahun ke tahun, tidak hanya wisatawan lokal saja wisatawan mancanegara juga mendominasi pertumbuhan wisata di dunia. Terkait hal tersebut Kementerian Pariwisata Indonesia berinisiatif untuk membuat sebuah kompetisi wisata antar daerah untuk meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan mancanegara ke Indonesia, hal ini juga sangat diperlukan bagi pariwisata daerah yang sedang berkembang dalam meningkatkan jumlah wisatawan yang akan berkunjung. Indonesia merupakan salah satu negara terbesar yang mayoritas warga negaranya beragama islam, hal ini menjadi alasan utama Kementerian Pariwisata Indonesia menciptakan kompetisi baru dalam sektor pariwisata, yakni wisata halal, dengan

tujuan menciptakan iklim pariwisata yang aman dan nyaman bagi wisatawan yang berkunjung ke Indonesia.

Wisata halal ini sendiri pertama kali di kenal pada tahun 2015, ketika sebuah event World Halal Tourism Summit (WHTS) digelar di Abu Dhabi, UEA. Wisata halal secara umum dapat diartikan sebagai kegiatan wisata yang dikhususkan untuk memfasilitasi kebutuhan berwisata umat islam². Kenapa dikatakan sebagai wisata halal, karena pariwisata halal merujuk dan berpaku pada aturan-aturan islam. Wisata halal juga mempunyai prospek yang sangat besar bagi industri pariwisata, prospek halal yang dimaksud tidak hanya berupa produk dan minuman non-alkohol saja, namun juga bentuk dari pelayanan, fasilitas penginapan, transportasi dan lainnya.

Wisata halal merupakan bentuk dari pariwisata yang lebih suka menggunakan layanan, fasilitas dan aktivitas yang sesuai dengan prinsip islami. Prinsip umum pariwisata halal adalah terhindar dari kemusyrikan, kemaksiatan, kemafsadatan, dan kemunkaran dan menciptakan kemaslahatan dan kemanfaatan baik secara material maupun spiritual³. Pariwisata halal memiliki kategori pariwisata sendiri, dimana kategori ini ditujukan untuk keluarga muslim yang mematuhi peraturan islam tanpa mengganggu wisatawan non muslim. Hal ini dimanfaatkan oleh pemerintah untuk menarik wisatawan lokal maupun wisatawan mancanegara yang berasal dari negara muslim.

Awal mulanya wisata halal ini muncul dikarenakan tingginya tingkat kunjungan wisatawan ke Indonesia, meningkatnya wisatawan yang berkunjung

² <http://disbudpar.acehprov.go.id/sekilas-tentang-wisata-halal/> diakses tanggal 15 Oktober 2018

³ Fatwa Nomor 108/DSN-MUI/X/2016

didominasi oleh wisatawan muslim yang berasal dari Timur Tengah, hal ini menjadi perhatian oleh Kementerian Budaya dan Pariwisata untuk dikembangkan lagi.

Terkait dengan peningkatan kunjungan wisatawan muslim di Indonesia, Kementerian Budaya dan Pariwisata membuat suatu kompetisi yang dinamakan wisata halal. Kompetisi wisata halal yang diselenggarakan di Indonesia merupakan hasil dari adanya sebuah event World Halal Tourism Summit (WHTS), karena Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata melihat Indonesia memiliki potensi yang bagus dalam sektor pariwisatanya. Wisata halal ini tingkatannya hanya nasional, berbeda dengan Word Halal Tourism Summit yang merupakan sebuah event yang tingkatnya sudah dunia. Untuk itu setiap Provinsi atau Daerah mulai membenahi sektor pariwisatanya untuk mengikuti event yang diselenggarakan oleh Kementerian Pariwisata.

Dalam kompetisi yang diadakan Kementerian Pariwisata dimenangkan oleh 3 Provinsi berdasarkan hasil voting kompetisi Wisata Halal Nasional yakni Aceh, Sumatera Barat, dan Nusa Tenggara Barat (NTB)⁴. Aceh sendiri memenangkan tiga kategori, yaitu Airport Ramah Wisata Muslim Terbaik, Destinasi Budaya Ramah Wisatawan Muslim Terbaik, dan Daya Tarik Wisatawan Terbaik. Nusa Tenggara Barat (NTB) memenangkan kategori Resort Ramah Wisatawan Muslim Terbaik, Website Ramah Wisatawan Muslim terbaik, Website Travel Ramah Wisatawan Terbaik, Destinasi Bulan Madu Ramah Wisatawan Muslim Terbaik, Kuliner Halal Khas Wisata Daerah Terbaik. Sumatera Barat juga

⁴ <https://minangtourism.com/fakta-wisata-halal-sumatera-barat/> diakses pada tanggal 17 Oktober 2018 pukul 19.30

memenangkan empat kategori yaitu, Biro Wisata Perjalanan Halal, Destinasi Wisata Halal Terbaik, Destinasi Kuliner Terbaik, dan Restoran Halal Terbaik.

Setelah kompetisi yang diselenggarakan oleh Kementerian Pariwisata, ketiga Provinsi yang menang (NTB, Aceh dan Sumatera Barat) diikuti sertakan dalam ajang World Halal Tourism Award 2016 di Abu Dhabi. World Halal Tourism Award kali ini, Indonesia melombakan 16 kategori. Pada tahun 2015, Indonesia hanya mendapatkan tiga penghargaan dalam kategori wisata halal, namun di tahun 2016 Indonesia memenangkan 12 kategori⁵. Pencapaian ini merupakan prestasi yang sangat membanggakan bagi pariwisata Indonesia, karena pariwisata halal Indonesia akan dikenal di seluruh dunia. Berikut adalah tabel perbedaan antara wisata konvensional, wisata religi dan wisata halal:

Tabel 1.1
Perbandingan wisata konvensional, wisata religi, dan wisata syariah

Nomor	Perbandingan	Konvensional	Religi	Halal/Syariah
1	Obyek	Alam, budaya, Heritage, Kuliner	Tempat Ibadah, Peninggalan Sejarah	Semuanya
2	Tujuan	Menghibur	Meningkatkan Spritualitas	Meningkatkan Spirituaitas dengan cara menghibur
3	Target	Menyentuh kepuasan dan kesenangan yang berdimensi nafsu, semata mata hanya untuk hiburan	Aspek spiritual yang bisa menenangkan jiwa. Guna mencari ketenangan batin	Memenuhi keinginan dan kesenangan serta menumbuhkan kesadaran beragama
4	Guide	Memahami dan menguasai informasi sehingga bisa	Menguasai sejarah tokoh dan lokasi yang menjadi obyek	Membuat turis tertarik pada obyek sekaligus membangkitkan

⁵ <https://www.kominfo.go.id/content/detail/8385/menangkan-whta-world-halal-tourism-award-untuk-pariwisata-indonesia-di-mata-dunia/0/artikel-gpr> diakses pada tanggal 17 Oktober 2018 pukul 10.00 WIB

		menarik wisatawan terhadap objek wisata	wisata	spirit religi wisatawan. Mampu menjelaskan fungsi dan peran syariah dalam bentuk kebahagiaan dan kepuasan batin dalam kehidupan manusia.
5	Fasilitas Ibadah	Sekedar pelengkap	Sekedar pelengkap	Menjadi bagian yang menyatu dengan obyek pariwisata, ritual ibadah menjadi bagian paket hiburan
6	Kuliner	Umum	Umum	Spesifik yang halal
7	Relasi dengan Masyarakat dilingkungan Obyek Wisata	Komplementar dan hanya untuk keuntungan materi	Komplementar dan hanya untuk keuntungan materi	interaksi berdasar pada prinsip syariah
8	Agenda Perjalanan	Setiap Waktu	Waktu-waktu tertentu	Memperhatikan waktu

Sumber : Laporan Pendahuluan : Kajian Pengembangan Wisata Syariah di Indonesia Tahun 2016

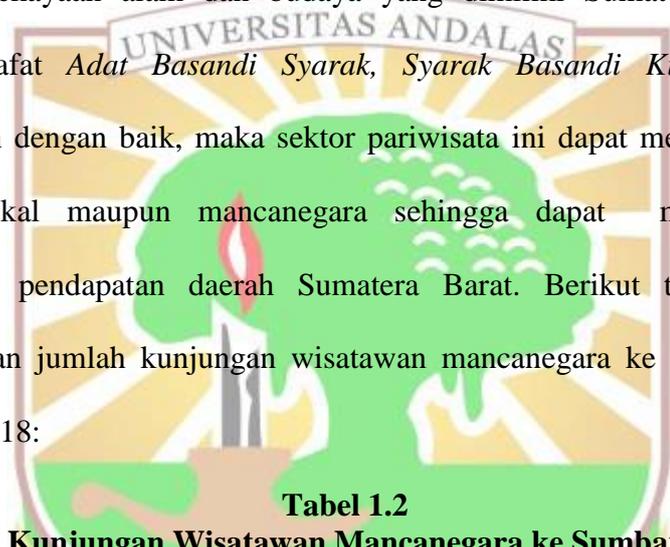
Meskipun konsep halal sudah menjadi gaya hidup bagi sebagian besar penduduk Indonesia, namun wisata halal kurang berkembang di Indonesia dikarenakan fasilitasi, tidak mudah memastikan makanan halal, sertifikasi halal, dan promosi yang kurang. Hal tersebut tampak dari hasil laporan lembaga riset dan pemeringkat industri pariwisata halal Crescentrating bersama Master Card, Global Muslim Travel Index (GMTI) 2015, Indonesia berada di urutan keenam tujuan wisata halal dunia, di bawah Malaysia dan Thailand⁶.

Sumatera Barat adalah salah satu Provinsi di Indonesia yang memiliki potensi pariwisata syariah atau halal yang besar dikarenakan budaya masyarakat

⁶ Adinugraha, Hendri dan Sartika, Mila dan Kadarningsih, Ana. 2018. Desa Wisata Halal: Konsep Dan Implementasinya Di Indonesia. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*. Volume 5. No. 1

Sumatera Barat yang sudah dari dulu diperkenalkan dengan islam dan lagi kekayaan sumber alam seperti misalnya keindahan gunung, lembah, danau, laut, pantai, pulau, dan sebagainya yang jika dikelola menjadi usaha kawasan pariwisata, dimana usaha kawasan wisata itu adalah usaha pembangunan atau pengelolaan kawasan untuk memenuhi kebutuhan pariwisata sesuai peraturan perundang-undangan yang dapat menunjang perekonomian masyarakat sekitar⁷.

Jika kekayaan alam dan budaya yang dimiliki Sumatera Barat yang memiliki filsafat *Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah* dapat dikembangkan dengan baik, maka sektor pariwisata ini dapat menarik perhatian wisatawan lokal maupun mancanegara sehingga dapat menunjang dan meningkatkan pendapatan daerah Sumatera Barat. Berikut tabel 1.2 yang memperlihatkan jumlah kunjungan wisatawan mancanegara ke Sumatera Barat tahun 2016-2018:



Tabel 1.2
Kunjungan Wisatawan Mancanegara ke Sumbar

Jumlah Wisatawan Mancanegara ke Sumatera Barat												
	Jan	Feb	Mar	April	Mei	Juni	Juli	Agu	Sept	Okt	Nov	Des
2016	3378	3892	4428	4063	4854	2104	4094	4224	3329	4980	5115	5225
2017	4020	4045	4989	4558	4109	2940	4080	5209	4347	4826	4622	8568
2018	3246	4459	5057	4286	2995	4549	5099					

Sumber : BPS (Badan Pusat Statistik) Sumatera Barat Tahun 2018

Berdasarkan Tabel 1.1 jumlah wisatawan mancanegara (wisman) yang berkunjung ke Sumatera Barat melalui Bandara Internasional Minangkabau (BIM) pada pertengahan tahun mengalami penurunan, namun meningkat drastis di

⁷ Peraturan Walikota Padang No 5 Tahun 2013 tentang Tanda Daftar Usaha Pariwisata.

penghujung tahun. Wisatawan mancanegara bulan Desember 2017 memberikan kontribusi terbesar terhadap total wisatawan mancanegara yang berkunjung ke Indonesia (Wisatawan Mancanegara Nasional 1.364.576 orang).

Pariwisata halal ini pun sejalan dengan visi dari Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Sumatera Barat tahun 2016-2021, yakni “Terwujudnya Sumatera Barat sebagai Destinasi Pariwisata Berbasis Agama dan Budaya yang Mampu Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Daerah dan Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat”⁸.

Sebagai unsur pelaksana dengan melakukan berbagai program dan kegiatan di bidang pariwisata, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Padang memiliki tugas pokok sebagai unsur pelaksana dan bertanggung jawab kepada Walikota Padang. Untuk terselenggaranya tugas pokok tersebut, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Padang memiliki fungsi sebagai berikut⁹:

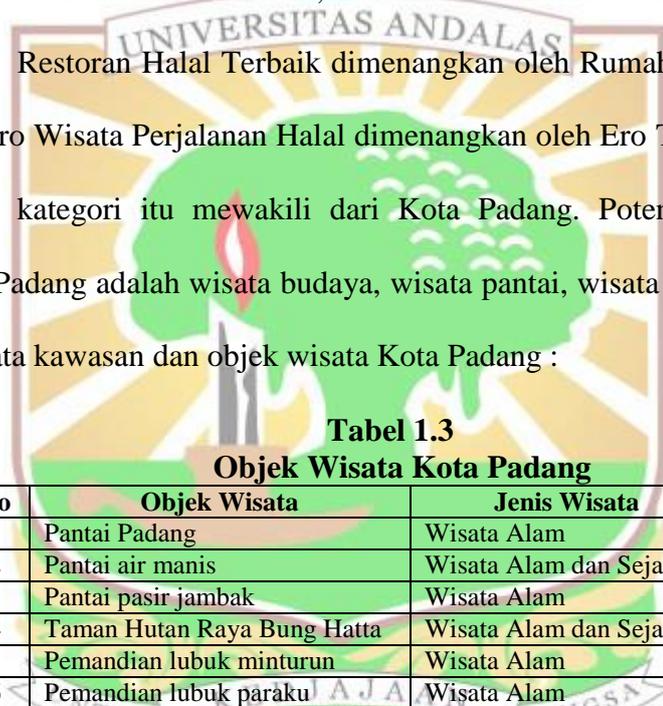
1. Perumusan kebijakan teknis di bidang pariwisata dan kebudayaan.
2. Penyelenggaraan urusan pemerintah dan pelayanan umum di bidang pariwisata dan kebudayaan.
3. Pembinaan dan pelaksanaan urusan di bidang pariwisata dan kebudayaan.
4. Pembinaan Unit Pelaksana Teknis Dinas.
5. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

⁸ Lakip Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016

⁹ Renstra Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Padang 2014-2019

Berdasarkan fungsi dari Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Padang di atas dapat dikatakan bahwa Pemerintah Kota Padang saat ini sedang berupaya dalam pengembangan di sektor pariwisata untuk dijadikan sebagai salah satu sumber pendapatan masyarakat.

Pada Kompetisi Wisata Halal Nasional yang diadakan oleh Kementerian Pariwisata Sumatera Barat memenangkan 4 kategori, yaitu Biro Wisata Perjalanan Halal, Destinasi Wisata Halal Terbaik, Destinasi Kuliner Terbaik, dan Restoran Halal Terbaik. Restoran Halal Terbaik dimenangkan oleh Rumah Makan Lamun Ombak dan Biro Wisata Perjalanan Halal dimenangkan oleh Ero Tour and Travel, dimana kedua kategori itu mewakili dari Kota Padang. Potensi wisata yang dimiliki Kota Padang adalah wisata budaya, wisata pantai, wisata kuliner. Berikut adalah tabel data kawasan dan objek wisata Kota Padang :



Tabel 1.3
Objek Wisata Kota Padang

No	Objek Wisata	Jenis Wisata
1	Pantai Padang	Wisata Alam
2	Pantai air manis	Wisata Alam dan Sejarah
3	Pantai pasir jambak	Wisata Alam
4	Taman Hutan Raya Bung Hatta	Wisata Alam dan Sejarah
5	Pemandian lubuk minturun	Wisata Alam
6	Pemandian lubuk paraku	Wisata Alam

Sumber: Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Padang

Kota Padang sendiri memiliki cukup banyak pantai yang sering dikunjungi oleh berbagai wisatawan seperti Pantai Padang yang dilengkapi cukup banyak wahana yang bisa dinikmati seperti spot melihat matahari terbenam, berbagai kios yang menyediakan makanan dan minuman, tugu merpati yang banyak digunakan sebagai tempat berfoto. Selain itu ada Pantai Air Manis yang berkaitan dengan cerita rakyat Si Malin Kundang yang menjadi batu dan pantai-

pantai yg berada di pulau kecil seperti sikuai, pulau cubadak yang memiliki pasir yang putih bersih.

Untuk wisata Kuliner di Kota Padang yang terkenal adalah Restoran Lamun Ombak yang identik dan memiliki hampir seluruh kuliner yang ada di Sumatera Barat, restoran ini yang mewakili Sumatera Barat dalam memenangkan penghargaan untuk restoran halal terbaik yang diselenggarakan Kementerian Pariwisata. Kota Padang baru memiliki 2 Restoran/Rumah Makan yang berlabel atau bersertifikat halal. Perihal ini disampaikan oleh Kasi Pemasaran Ekonomi Kreatif Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Padang dalam wawancara yang dilakukan peneliti sebagai berikut :

“baru ada sekitar 2 rumah makan/restoran yang sudah mengantongi sertifikat halal di Kota Padang, yakni diantaranya adalah Rumah Makan Lamun Ombak dan Restoran Sari Raso selain dari rumah makan tersebut masih menunggu rekomendasi dari kami untuk mendapatkan rekomendasi sertifikasi halal” *(Hasil Wawancara dengan Bapak Ade Yonanda Irza, Kepala Seksi Pemasaran Ekonomi Kreatif Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Padang Pada Tanggal 11 Desember 2018 Pukul 14.20)*

Dari hasil wawancara peneliti dengan Kepala Seksi Pemasaran Ekonomi Kreatif Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Padang disebutkan baru dua Rumah Makan di Kota Padang yang memiliki sertifikasi halal sebagaimana hal ini yang diperlukan dalam mempertegas peran dari swasta dalam mendukung pariwisata halal, dari masyarakat sebenarnya mereka menyadari bahwa restoran/rumah makan sudah menyediakan makanan halal, namun bagi wisatawan mancanegara tentunya perlu bagi mereka untuk mengetahui makanan yang mereka makan apakah halal atau tidak, yakni dengan adanya sertifikat halal.

Sebagai upaya mendukung sektor pariwisata halal, Kota Padang serta menyediakan paket-paket wisata daerah-daerah sekitarnya. Paket wisata tersebut seperti Hotel dan Biro Perjalan Wisata. Fasilitas penginapan untuk kebutuhan peristirahatan bagi wisatawan Sumatera Barat di berbagai kabupaten/kota tersedia dengan jumlah yang ditunjukkan tabel berikut :

Tabel 1.4
Jumlah Infrastruktur Peristirahatan di Sumatera Barat

No	Kab/Kota	Akomodasi	Kamar	Tempat Tidur
1	Kep. Mentawai	12	155	338
2	Pesisir Selatan	17	241	488
3	Solok	7	103	160
4	Sijunjung	12	170	261
5	Tanah Datar	9	124	225
6	Padang Pariaman	6	100	173
7	Agam	21	190	326
8	Lima Puluh Kota	16	116	189
9	Pasaman	14	174	366
10	Solok Selatan	12	181	299
11	Dharmasraya	11	223	386
12	Pasaman Barat	17	272	524
13	Padang	62	1.071	1.922
14	Solok	6	133	234
15	Sawahlunto	1	21	37
16	Padang Panjang	19	295	455
17	Bukittinggi	49	758	1.388
18	Payakumbuh	11	244	442
19	Pariaman	11	179	318
Total		313	4750	8531

Sumber : BPS (Badan Pusat Statistik) Sumatera Barat Tahun 2016

Dari tabel tersebut dapat dilihat Padang menjadi spot yang paling mendominasi infrastruktur peristirahatan bagi para wisatawan dengan jumlah kamar **1071** unit dan jumlah tempat tidur **1922** unit di wilayah Sumatera Barat. Kenyamanan dan kelengkapan fasilitas juga harus diperhatikan dari hotel dan rumah makan/restoran tersebut untuk memberikan kepuasan kepada wisatawan saat datang berwisata ke Kota Padang. Saat ini Kota Padang memiliki cukup

banyak hotel, baik hotel berbintang maupun hotel-hotel melati yang menunjang pariwisata. Hotel tersebut sebagai akomodasi penginapan bagi para wisatawan baik nusantara maupun mancanegara. Berikut data terkait jumlah hotel yang ada di Kota Padang :

Tabel 1.5
Data Jumlah Hotel Berbintang dan Hotel Melati di Kota Padang

No	Jenis Hotel	Jumlah
1	Hotel Berbintang	25
2	Hotel Melati	62

BPS (Badan Pusat Statistik) Sumatera Barat Tahun 2016

Berdasarkan tabel 1.5 di atas dapat dilihat banyak terdapat hotel berbintang maupun hotel kelas melati, meskipun beberapa hotel di Kota Padang dalam pelayanannya belum semua menerapkan prinsip syar'i, misalnya jika dua orang dengan jenis kelamin berbeda akan diminta buku nikah bila menginap, tersedia petunjuk arah kiblat di setiap kamar, dan lain- lain. Hotel bersertifikasi halal di Kota Padang sendiri belum banyak padahal disebutkan oleh pemerintah bahwa pada tahun 2019 Restoran/ Rumah Makan dan hotel wajib memiliki sertifikasi halal. Hal ini dipertegas oleh Ketua (LPPOM MUI) Sumbar, Syaifullah melalui media *online*, berikut pernyataannya:

“...tahun 2019 itu semua hotel dan restoran wajib mempunyai sertifikasi halal. Makanya, di tahun 2018 kami terus menggenjotnya. Bagi hotel dan restoran akan dikenakan sanksi berupa denda sebesar Rp. 2 miliar apabila belum memiliki sertifikasi halal,”([Restoran dan Hotel Wajib Sertifikasi Halal, www.padangekspres.co.id](http://www.padangekspres.co.id) diakses pada tanggal 20 Oktober 2018 pukul 20.00 WIB)

Untuk restoran, rumah makan dan hotel harus memiliki layak sehat dari Dinas Kesehatan sehingga pengurusan sertifikasi halal bisa dikeluarkan oleh LPPOM MUI Sumbar. Harus ada koordinasi dan kerja sama dinas kesehatan

kabupaten/kota, dengan demikian, bagi restoran dan hotel yang belum mengantongi layak sehat harus segera diproses apalagi yang berada di sekitar objek wisata. Saat ini objek wisata Pantai Padang merupakan objek wisata halal yang sedang dikembangkan oleh pihak Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Padang seperti yang dijelaskan oleh Kepala Bidang Destinasi, Usaha dan Industri Pariwisata Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Padang dalam wawancara berikut ini :

“objek wisata pantai padang saat ini kami kembangkan dengan dengan kesan syariah, penempatan satpol pp berguna untuk menjaga lingkungan agar terhindar dari tindakan yang *mudarat*, imbauan kepada pedagang disana agar tidak menjual minuman keras dan juga rumah makan agar menyertai sertifikat halal dan perbaikan fasilitas/sarana pendukung lainnya” *(Hasil Wawancara dengan Bapak Wilman Muchtar, Kepala Bidang Destinasi, Usaha dan Industri Pariwisata Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Padang Pada Tanggal 11 Desember 2018 Pukul 10.00 WIB)*

Dari wawancara tersebut objek wisata pantai padang yang dikemas menjadi wisata halal diharapkan menarik kunjungan wisatawan nusantara dan mancanegara khususnya wisatawan muslim, ditambah lagi dengan adanya Masjid yang masih dalam proses pembangunan di tepi pantai padang bisa menjadi daya tarik bagi wisatawan.

Namun seiring peningkatan wisatawan seharusnya juga diikuti dengan kebersihan lingkungan objek wisata, permasalahan di pantai padang sendiri adalah adanya sampah yang menumpuk di bibir pantai. Hal tersebut dapat dilihat pada gambar 1.1 berikut :

Gambar 1.1
Sampah Yang Menumpuk di Pantai Padang



Sumber: Dokumentasi Peneliti

Pada gambar 1.1 di atas terlihat bagaimana kondisi pantai padang yang banyak dipenuhi dengan sampah berserakan yang hanyut dari hulu sungai apalagi dengan kondisi hujan deras memperparah jumlah sampah yang hanyut ke pantai. Kondisi lingkungan merupakan salah satu faktor kenyamanan bagi para pengunjung untuk berkunjung ke suatu tempat wisata. Kondisi lingkungan yang banyak dipenuhi sampah akan membuat wisatawan menjadi tidak nyaman dan berakibat pada penurunan jumlah kunjungan wisatawan.

Selain objek wisata pantai padang, dalam upaya untuk mengembangkan objek wisata lainnya sebagai objek wisata pendukung bagi wisatawan yang berkunjung ke Padang. Salah satu objek wisata pendukung pariwisata halal di Kota Padang adalah Masjid Raya Sumbar, berikut wawancara peneliti dengan Kepala Seksi Pemasaran Ekonomi Kreatif Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Padang:

“Secara langsung lokasi tersebut sebagai tempat ibadah, namun secara tidak langsung memberikan daya tarik wisatawan berkunjung, untuk itu **Disbudpar menjadikan Masjid Raya Sumbar sebagai salah satu destinasi putaran bus wisata selain Kawasan Wisata Gunung Padang**” ”(Hasil Wawancara dengan Bapak Ade Yonanda Irza. Kepala Seksi Pemasaran Ekonomi Kreatif Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Padang Pada Tanggal 11 Desember 2018 Pukul 14.20 WIB)

Dengan keunikan arsitekturnya ini juga menjadi tempat yang ramai dikunjungi oleh para wisatawan terlebih pada malam hari. Banyak wisatawan yang beribadah sekaligus berfoto ria, karena keindahan yang ditawarkan masjid ini sangat menakjubkan. Berikut foto dokumentasi peneliti di kawasan Masjid Raya Sumbar:



Sumber : Dokumentasi Peneliti Tahun 2018

Masjid Raya Sumatera Barat yang dinobatkan sebagai masjid terbesar di pulau Sumatera selain digunakan sebagai tempat beribadah juga diharapkan menjadi sarana penjangking wisatawan, dengan letak yang strategis yaitu di jantung Kota Padang wisatawan dapat dengan mudah berkunjung dengan sarana transportasi yang tersedia di Kota Padang.

Sarana transportasi sebagai penunjang pariwisata merupakan aspek yang harus diperhatikan dalam pengembangan pariwisata. Selain sebagai sarana promosi, transportasi merupakan unsur yang mempengaruhi jumlah wisatawan untuk berkunjung. Maka dari itu dalam mengembangkan sektor pariwisata, maka sarana transportasi penunjang pariwisata juga harus dipersiapkan secara optimal. Terkait sarana transportasi dalam pengembangan pariwisata halal, peneliti melakukan wawancara dengan Kepala Seksi Pemasaran Ekonomi Kreatif Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Padang:

“untuk transportasi yang mendukung wisata halal/syariah bisa menggunakan layanan biro perjalanan pariwisata, mereka ada yang memiliki paket khusus wisata halal seperti Ero Tour and Travel juga ada pilihan bus Trans Padang yang memisahkan tempat duduk antara pria dan wanita tempat duduk prioritas untuk para penumpang lanjut usia, ibu hamil, dan penumpang dengan anak serta penumpang berkebutuhan khusus”(Hasil Wawancara dengan Bapak Ade Yonanda Irza. Kepala Seksi Pemasaran Ekonomi Kreatif Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Padang Pada Tanggal 20 November 2018 Pukul 14.20 WIB)

Dari wawancara tersebut dapat dikatakan untuk pengembangan pariwisata halal pihak pemerintah merekomendasikan biro wisata perjalanan sebagai media transportasi, karena mereka memiliki paket-paket wisata yang membuat wisatawan tertarik dan juga dilengkapi asuransi jika hal yang tidak diinginkan terjadi. Ini sekaligus mengisi kas pemerintah kota dan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah. Pariwisata di Kota Padang saat ini juga mengalami peningkatan seperti yang ditunjukkan pada tabel berikut ini:

Tabel 1.6
Jumlah Kunjungan Wisatawan Mancanegara Ke Kota Padang

No	Negara	Tahun	
		Jan-Okt 2017 (jiwa)	Jan-Okt 2018 (jiwa)

1	Malaysia	33.770	34.301
2	Australia	2.423	2.798
3	Perancis	415	623
4	Singapura	275	1639
5	Amerika Serikat	449	521
6	Inggris	323	400
7	Tiongkok	313	362
8	Jerman	173	281
9	India	168	224
10	Jepang	221	244
14	Lainnya	4.785	3.088
	Total	43.315	44.445

Sumber: Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Padang

Dari Tabel 1.6 di atas dapat diketahui jumlah wisatawan mancanegara yang berkunjung ke Kota Padang meningkat pada periode tahun 2017 ke tahun 2018. Peningkatan ini disebabkan juga karena Kementerian Pariwisata menetapkan Sumatera Barat sebagai destinasi wisata halal melalui promosi wisata sehingga dapat dikenal di kancah internasional, salah satu dampak yang dirasakan dari peningkatan kunjungan dan pengembangan pariwisata yang baik adalah meningkatnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) sektor pariwisata. Berikut tabel yang memperlihatkan kontribusi pendapatan objek wisata terhadap PAD Kota Padang :

Tabel 1.7 Persentase Kontribusi Pendapatan Sektor Pariwisata Terhadap PAD Kota Padang

Tahun	Pendapatan(Rp)	PAD(Rp)	Persentase
2014	435,539,500	315,678,797,930	0.14
2015	391,530,000	370,413,737,165	0.11
2016	513,065,500	392,315,687,647	0.13
2017	595,789,800	456,400,549,074	0.13
Jumlah	2,321,410,800	1,772,463,338,291	0.67

Sumber: Badan Pendapatan Daerah Kota Padang Tahun 2018

Dari tabel 1.7 terlihat bahwa terjadi penurunan kontribusi pendapatan objek wisata terhadap PAD kota Padang dari tahun 2014 sampai tahun 2015. Namun pada tahun 2016 mengalami kenaikan dan stabil pada tahun 2017. Penurunan kontribusi terjadi disebabkan beberapa faktor seperti banyaknya pungutan liar disekitar objek, penetapan tarif parkir yang tidak beraturan serta

harga menu kuliner yang terlalu tinggi sehingga menyebabkan minat pengunjung menjadi berkurang dan ini akan berdampak pada penurunan pendapatan objek wisata dan juga PAD di kota Padang.

Untuk promosi dalam rangka mewujudkan wisata halal atau wisata syariah, telah dilaksanakan oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Padang dalam beberapa kegiatan yang tercantum dalam tabel berikut :

Tabel 1.8
Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata

No	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program
1	Pesona Padang Bike Adventure	Terselenggaranya event untuk pariwisata
2	Fasilitasi Tourism dan Badan Promosi Pariwisata	Tersedianya promosi pariwisata dan meningkatkan kenyamanan wisatawan
3	Seminar Kepariwisata Nasional	Dikenalnya Padang sebagai destinasi halal
4	Promosi Pariwisata Dalam dan Luar Negeri	Terlaksananya promosi bersama
5	Pelaksanaan Kegiatan Tour de Singkarak	Terlaksananya even Tour de Singkarak
6	Pemilihan Duta Wisata	Terpilihnya duta wisata uda/uni Padang
7	Pembuatan Bahan Promosi Pariwisata	Tersedianya booklet, vcd dan kalender

Sumber: Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Padang

Dari tabel di atas dapat dilihat seminar kepariwisataan nasional merupakan salah satu kegiatan pengembangan pariwisata yang bertujuan untuk lebih dikenalnya Kota Padang sebagai destinasi pariwisata halal karena budaya Minangkabau sendiri bisa berdampingan dengan pariwisata halal tersebut.

Faktor lain yang juga harus diperhatikan dalam melakukan pengembangan pariwisata adalah regulasi yang mengatur peruntukan dan pengembangan pariwisata tersebut. Pada pengembangan pariwisata Kota Padang saat ini, regulasi pengembangan pariwisata halal belum lengkap. Hal tersebut disampaikan Kepala Seksi Pemasaran Ekonomi Kreatif Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Padang dalam wawancara berikut ini:

“Rancangan Peraturan Daerah Wisata Halal hingga saat ini masih dibahas dengan tenaga ahli yang digandeng oleh Pemprov, Potensi wisata halal di Sumbar terbilang besar, apalagi sejak 2016 Kementerian Pariwisata menetapkan provinsi ini sebagai salah satu daerah tujuan wisata halal, agar pengelolaannya lebih optimal perlu ada payung hukum dalam bentuk peraturan daerah”(Hasil Wawancara dengan Bapak Ade Yonanda Irza. Kepala Seksi Pemasaran Ekonomi Kreatif Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Padang Pada Tanggal 11 Desember 2018 Pukul 11.30 WIB)

Dari hasil wawancara di atas disebutkan bahwa Kota Padang belum memiliki aturan hukum yang melandasi setiap pelaksanaan program pariwisata halal. Kota Padang belum memiliki Ranperda sebagai landasan hukum yang mengatur tentang pengembangan pariwisata halal. Padahal Ranperda ini sangat penting untuk menentukan arah dan tujuan dari pengembangan pariwisata halal untuk jangka panjang.

Dengan potensi pariwisata yang dimiliki Kota Padang yang juga merupakan kota budaya yang memiliki potensi budaya yang banyak, jika dikelola serta dikembangkan secara optimal dapat berkontribusi dalam peningkatan PAD dan kesejahteraan masyarakat Kota Padang. Selain itu Kota Padang juga tidak memiliki sumber daya alam yang banyak untuk diandalkan, maka dari itu sektor pariwisata bisa dijadikan solusi alternatif untuk pendapatan daerah.

Dengan menggunakan teori pengembangan pariwisata menurut Robert Christie Mill, potensi pariwisata yang ada di Kota Padang dapat diolah dengan baik menjadi produk wisata halal yang dapat dijual dan menarik tidak hanya wisatawan muslim saja, wisatawan mancanegara non muslim pun dapat datang berwisata atau dengan kata lain sektor pariwisata dapat dijadikan sebagai industri yang menjanjikan karena perkembangannya dapat menghidupkan sektor-sektor

lain yang terkait dan pada gilirannya akan meningkatkan perekonomian serta kesejahteraan masyarakat. Dalam meningkatkan pengembangan pariwisata halal Kota Padang tersebut Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Padang melakukan program terkait pengembangan pariwisata. Adapun kegiatan yang menyangkut Program Pengembangan Destinasi Pariwisata untuk tahun 2017 antara lain ¹⁰:

1. Pembinaan usaha pariwisata dan pengelolaan pariwisata.
2. Pemeliharaan dan peningkatan sarana dan prasarana objek wisata.
3. Pengadaan sarana dan prasarana untuk wisata pantai.
4. Peningkatan kebersihan objek wisata pantai.

Untuk menghadapi semua tantangan dan kelemahan internal maupun eksternal dalam mengembangkan sektor pariwisata yang ada, pemerintah dengan melihat dan mempertimbangkan segala aspek yang ada, baik itu analisa pasar, analisa teknik dan perencanaan, analisa sosio-ekonomi, analisa bisnis dan hukum.

Berdasarkan fenomena-fenomena terkait dalam pengembangan pariwisata halal Kota Padang, peneliti melihat masih banyak kendala yang dialami dan harus diselesaikan dalam mengembangkan pariwisata. Maka dari itu, peneliti tertarik untuk meneliti lebih jauh mengenai **“Pengembangan Pariwisata Halal Oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Padang”**

¹⁰ Rencana Kerja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Padang Tahun 2017

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang di jelaskan di atas, maka rumusan masalah dari penelitian ini adalah bagaimana Pengembangan Pariwisata Halal Oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Padang.

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah dan rumusan masalah, maka tujuan dari penelitian ini adalah mendeskripsikan dan menganalisis Pengembangan Pariwisata Halal Oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Padang

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

Manfaat Teoritis : Penelitian ini diharapkan dapat menambah dan memberikan pengetahuan kepada rekan mahasiswa Ilmu Administrasi Publik lainnya tentang Pengembangan Pariwisata Halal Oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Padang.

1.4.2 Manfaat Praktis

Secara praktisnya penelitian ini diharapkan dapat memberikan saran, acuan dan sumbangan pikiran pada instansi yang terkait, yakni Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Padang.

